

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan dan tata kelola yang baik dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keistimewaan dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya (desentralisasi) melalui otonomi daerah. Dalam hal ini, Undang-undang terbaru yang mengatur otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan akuntabel di daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Menurut Halim (2007:24), “Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.”

Dalam hal ini, kinerja keuangan menjadi tolak ukur dalam menilai laporan keuangan pemerintahan layak atau tidaknya tersebut. Berdasarkan informasi yang diakses pada sumsel.antaranews.com pada tanggal 30-11-2022 dijelaskan bahwa Realisasi penyerapan APBN di Provinsi Sumatera Selatan mencapai senilai Rp36,38 triliun atau 85,21 persen per November 2022 dari pagu anggaran tahun. Dalam hal ini, berdasarkan Forum ALCo (aset dan liabilitates Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan, menyebutkan realisasi APBN ini merupakan untuk menstabilisasi perekonomian di Sumsel. Namun hal ini juga, kinerja keuangan pemerintah daerah banyak terjadinya kecurangan, lemahnya pengelolaan keuangan daerah juga menjadi indikator besarnya potensi terjadinya korupsi dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan informasi yang diakses pada merdeka.com pada tanggal 30-11-2022 dijelaskan bahwa tiga pejabat Desa Darmo, Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatera Selatan, dipenjara karena melakukan penyelewengan penggunaan keuangan desa dari kompensasi PT Menambang Muara Enim (MME) yang dikorup sebesar Rp15,5 miliar.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bab 1, Pasal 1, Ayat 18 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004). PAD merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim dan Kusufi, 2012:101). Hal ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber dari pendapatan utama keuangan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang diakses pada sumsel.antaranews.com pada tanggal 29-10-2022 dijelaskan bahwa ditahun tersebut terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, Sumatera Selatan hingga Oktober 2022 ini mencapai Rp895 miliar atau 82,93 persen dari target Rp1,080 triliun. Dalam hal ini, PAD belum tercapai sesuai dengan target yang dituju. Maka, daripada itu Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting dalam

membangun pemerintah daerah lebih maju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah.



Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan LKPD Sumsel 2017-2021

Gambar 1.1
Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar grafik rata-rata Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan juga penurunan pada beberapa Kabupaten/Kota. Namun, hanya Kota Palembang yang mengalami rata-rata kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Kabupaten/kota yang lainnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat wajib dan rutin, yang digunakan untuk membiayai tugas dan fungsi pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan publik di daerah. DAU merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan

pemerintahannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nordiawan, 2017:87). Berdasarkan informasi yang diakses pada palembang.tribunnews.com pada tanggal 28-06-2020 dijelaskan bahwa terjadinya tindak korupsi penggunaan dana kelurahan di seluruh kelurahan di Kota Prabumulih, dana tersebut merupakan dari dana kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan kisaran senilai Rp8,8 miliar. Dalam hal tersebut dapat berpengaruh terhadap berkurangnya atau hilangnya anggaran dari Dana Alokasi Umum tersebut. Dana Alokasi Umum sangatlah penting untuk daerah yang terkait karena dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah.



Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan LKPD Sumsel 2017-2021

Gambar 1.2 **Rata-rata Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan** **Tahun 2017-2021**

Berdasarkan gambar grafik rata-rata Dana Alokasi Umum tahun 2017-2021 diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada beberapa Kabupaten/Kota. Namun, terdapat beberapa Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan termasuk Kota Palembang yang mengalami rata-rata kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Kabupaten/kota yang lainnya.

Menurut Mursyidi (2013:305), “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.” Berdasarkan informasi yang diakses pada detik.com pada tanggal 09-12-2022 dijelaskan bahwa terjadinya korupsi pembangunan gedung DPRD di Sumatera Selatan. Di kasus ini PT Adhi Pramana Mahogra selaku pelaksana proyek tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Perusahaan itu justru berhenti bekerja saat bobot pekerjaan masih 2,76 persen. “Padahal penyedia telah melakukan pencairan uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp7.110.534.600” ungkap Penkum Kejadi Sumsel. Maka, daripada itu Belanja Modal sangatlah penting dalam pembangunan infrastruktur daerah agar lebih maju.



Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan LKPD Sumsel 2017-2021

Gambar 1.3
Rata-rata Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar grafik rata-rata Belanja Modal tahun 2017-2021 diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal di pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan signifikan pada beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kota Palembang dan Kabupaten Kabupaten Banyuasin. Namun, terdapat juga beberapa Kabupaten/kota yang mengalami penurunan termasuk Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang mengalami rata-rata penurunan yang dibandingkan dengan Kabupaten/kota yang lainnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian Winanda Chyntia Simamora, dkk pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020”. Penelitian ini memperoleh data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian ini terutama yang didapat dari jurnal, surat kabar, maupun internet.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maka, penulis mengambil judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?

3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat banyak faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, baik faktor Kinerja Keuangan (financial performance) dan kinerja non keuangan (non financial performance). Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
3. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pengaplikasian teori yang didapat selama pembelajaran serta dapat menambah wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

3. Bagi Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam pengetahuan ilmu Akuntansi Pemerintahan khususnya dalam pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi.